

ASIAN GAMES IV 1962 DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA ERA DEMOKRASI TERPIMPIN

Hanan Ardra Dwiaستاما¹, Eko Ribawati²

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang

E-mail: *2288230021@untirta.ac.id¹, eko.ribawati@untirta.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan Asian Games IV di Jakarta tahun 1962 sebagai instrumen diplomasi internasional dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin. Asian Games 1962 tidak sekadar ajang olahraga, melainkan sarana politik untuk memperkuat citra Indonesia sebagai pemimpin negara-negara Asia-Afrika. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sejarah, mengandalkan data primer dari arsip pidato Presiden Sukarno dan dokumen GANEFO, serta data sekunder berupa artikel jurnal dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asian Games 1962 menjadi proyek nation branding Sukarno yang ditandai dengan pembangunan Gelora Bung Karno. Kontroversi diplomatik berupa pengusiran Israel dan Taiwan (ROC) memicu sanksi dari IOC. Sebagai respons langsung, Sukarno menggagas GANEFO 1963 sebagai arena tandingan bagi negara Dunia Ketiga untuk melawan dominasi Barat. Rangkaian peristiwa ini menandai pergeseran politik luar negeri Indonesia dari diplomasi kooperatif menuju konfrontasi terbuka dalam periode 1962–1965. Kesimpulan menegaskan bahwa Asian Games 1962 merupakan titik balik yang signifikan dalam tradisi diplomasi olahraga dan orientasi politik luar negeri Sukarno.

Asian Games 1962, Demokrasi Terpimpin, Diplomasi Olahraga, GANEFO, Politik Luar Negeri

Kata kunci

ABSTRACT

This research aims to analyze the utilization of the 4th Asian Games in Jakarta in 1962 as an instrument of international diplomacy and its impact on Indonesia's foreign policy during the Guided Democracy era. The 1962 Asian Games was not merely a sporting event but a political means to strengthen Indonesia's image as a leader of Asian-African nations. The method used is qualitative with a historical approach, relying on primary data from President Sukarno's speech archives and GANEFO documents, as well as secondary data from journal articles and books. The findings indicate that the 1962 Asian Games served as Sukarno's nation-branding project, marked by the construction of Gelora Bung Karno as a symbol of modernity and nationalism. A diplomatic controversy involving the expulsion of Israel and Taiwan (ROC) led to sanctions from the IOC. In direct response, Sukarno initiated the GANEFO 1963 as a counter-arena for Third World nations to challenge Western dominance. This series of events marked a shift in Indonesia's foreign policy from a cooperative diplomatic approach toward open confrontation during the 1962–1965 period. The conclusion asserts that the 4th Asian Games 1962 played a critical role in shaping the direction of Indonesia's foreign policy during the Guided Democracy era.

1962 Asian Games, Diplomacy, Foreign Policy, GANEFO, Guided Democracy

Keywords

1. PENDAHULUAN

Studi mengenai hubungan internasional dan diplomasi modern tidak dapat dilepaskan dari peran mega-event olahraga sebagai panggung politik. Olahraga, dalam konteks politik internasional, seringkali bertransmutasi dari sekadar kompetisi fisik menjadi instrumen soft power yang strategis untuk mobilisasi nasionalisme, pembentukan citra bangsa (nation branding), dan legitimasi politik sebuah rezim. Dalam sejarah Indonesia, momen penting di mana olahraga dan politik luar negeri bertemu secara eksplosif adalah pada penyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta tahun 1962. Event ini bukan hanya menandai capaian besar dalam pembangunan infrastruktur dan prestasi atletik, melainkan jauh lebih penting, ia merupakan sarana politik dan diplomasi yang sangat vital bagi rezim Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Sukarno secara jelas melihat event olahraga besar ini sebagai alat untuk memperkuat citra Indonesia di kancah global sebagai pemimpin negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka.

Penyelenggaraan Asian Games 1962 berlangsung di tengah pusaran ketegangan Perang Dingin dan dinamika politik global antara Old Established Forces (OEFO) dan New Emerging Forces (NEFO) yang terdiri dari negara-negara Dunia Ketiga. Dalam situasi tersebut, kebijakan luar negeri Indonesia mulai menunjukkan pergeseran orientasi dari prinsip bebas-aktif yang kooperatif, menuju sikap yang lebih konfrontatif untuk menantang tatanan internasional yang dianggap didominasi oleh kekuatan imperialis Barat. Elit politik Indonesia sendiri pada masa itu menghadapi dilema antara kebutuhan untuk menerima dukungan asing dengan ambisi untuk berdiri mandiri dan memimpin negara Dunia Ketiga. Penggunaan Asian Games sebagai instrumen politik ini kemudian mencapai puncaknya ketika panitia penyelenggara menolak mengeluarkan visa untuk delegasi dari Israel dan Taiwan (ROC) atas dasar solidaritas politik, yang kemudian memicu sanksi dari International Olympic Committee (IOC).

Kontroversi diplomatik dan sanksi dari IOC tersebut menghasilkan respons yang radikal dan berdampak luas terhadap kebijakan luar negeri Indonesia: Sukarno secara langsung mengggas GANEFO (Games of the New Emerging Forces) pada tahun 1963. GANEFO diposisikan sebagai arena olahraga tandingan yang murni politis, bertujuan untuk menggalang solidaritas negara-negara baru merdeka dan melawan hegemoni Barat dalam olahraga internasional. Peneliti menempatkan Asian Games 1962 dan GANEFO sebagai bagian integral dari konsep "worldmaking" Sukarno, yaitu upaya visioner untuk menciptakan tatanan dunia antikolonial yang baru. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Asian Games IV (Jakarta, 1962) dimanfaatkan oleh rezim Sukarno untuk tujuan diplomasi dan pembentukan citra internasional Indonesia selama era Demokrasi Terpimpin. Lebih lanjut, akan dikaji sejauh mana penyelenggaraan Asian Games 1962 berkontribusi pada lahirnya GANEFO dan perubahan kebijakan luar negeri Indonesia, serta mencari bukti empiris yang menegaskan pengaruh Asian Games 1962 terhadap tindakan-tindakan kebijakan luar negeri Sukarno selama periode 1962–1965. Dengan menganalisis keterkaitan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik balik yang signifikan dalam tradisi diplomasi olahraga dan pergeseran orientasi politik luar negeri Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan berpegangan pada pendekatan sejarah. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menafsirkan peristiwa masa lalu dan secara kritis menganalisis hubungan sebab-akibat antara penyelenggaraan

mega-event olahraga dengan perubahan arah kebijakan luar negeri, khususnya pada era Demokrasi Terpimpin. Dalam kerangka ini, data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh langsung dari arsip dan dokumen yang berasal dari masa peristiwa tersebut, termasuk arsip pidato Presiden Sukarno, dokumen resmi pemerintah terkait olahraga dan diplomasi, arsip dari International Olympic Committee (IOC) yang berkaitan dengan sanksi, dan dokumen resmi dari Games of the New Emerging Forces (GANEF). Sementara itu, data sekunder bersumber dari berbagai literatur akademis, seperti artikel jurnal, buku sejarah, dan penelitian terdahulu yang membahas secara spesifik mengenai politik luar negeri Indonesia, diplomasi olahraga, dan GANEFO. Teknik analisis yang diterapkan adalah deskriptif-analitis.

Teknik ini melibatkan proses mendeskripsikan temuan sejarah secara mendalam dan kemudian menganalisisnya untuk menemukan pola, hubungan, dan interpretasi yang logis antara peristiwa Asian Games 1962 dan kebijakan luar negeri yang dihasilkan. Selama proses analisis, dilakukan triangulasi data, yaitu membandingkan dan mengaitkan informasi dari sumber primer (misalnya, pidato Sukarno) dengan interpretasi dan teori dari sumber sekunder (misalnya, konsep worldmaking atau soft power), guna memperkuat validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Penyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta pada tahun 1962, yang berlangsung dari 24 Agustus hingga 4 September, merupakan sebuah proyek nasional yang sangat ambisius dan monumental. Acara ini berada di bawah kendali langsung Presiden Sukarno dan memiliki dampak konkret terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia selama Era Demokrasi Terpimpin. Asian Games 1962 bukan sekadar ajang kompetisi olahraga biasa, melainkan dimanfaatkan secara strategis sebagai instrumen politik untuk mengobarkan semangat nasionalisme dan memperkuat legitimasi rezim yang berkuasa.

Keberhasilan penyelenggaraan event ini diwarnai dengan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, sebuah inisiatif yang kemudian dikenal sebagai Politik Mercusuar. Proyek ambisius ini tidak hanya didukung oleh sumber daya domestik, tetapi juga melibatkan bantuan teknis yang signifikan dari Uni Soviet. Tujuannya sangat jelas: membangun citra Indonesia sebagai negara merdeka yang modern, kuat, dan patut diperhitungkan eksistensinya di kancah global. Simbol-simbol utama dari proyek *nation branding* ini adalah kompleks Gelora Bung Karno (GBK) yang megah, Hotel Indonesia (HI) yang ikonik, serta peluncuran perdana Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang bertepatan dengan hari pembukaan acara, menandai era baru dalam komunikasi massa di Indonesia.

Namun, di balik kesuksesan penyelenggaraan dan upaya *nation branding* yang gemilang, Asian Games 1962 segera memicu kontroversi diplomatik yang signifikan, mengubah haluan politik luar negeri Indonesia secara drastis. Sesuai dengan agenda politik luar negeri Sukarno yang anti-kolonialisme dan berpihak pada negara-negara Arab/Palestina, panitia penyelenggara menolak untuk mengeluarkan visa bagi delegasi dari Israel dan Taiwan (ROC). Keputusan ini secara terang-terangan melanggar doktrin Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang memisahkan politik dari olahraga.

Akibatnya, IOC menjatuhkan sanksi skorsing kepada Indonesia, sebuah peristiwa yang mencatat sejarah sebagai sanksi pertama yang pernah dijatuhkan oleh IOC kepada negara pesertanya. Kontroversi dan sanksi dari IOC ini mendorong Sukarno untuk

mengambil langkah yang lebih radikal dan konfrontatif. Sebagai respons langsung, ia menggagas Games of the New Emerging Forces (GANEFO) pada tahun 1963. Lahirnya GANEFO menjadi bukti empiris yang tak terbantahkan mengenai pergeseran orientasi kebijakan luar negeri Indonesia, dari strategi diplomasi kooperatif menjadi konfrontasi terbuka dalam periode 1962–1965.

Secara keseluruhan, Asian Games IV di Jakarta tahun 1962 adalah peristiwa krusial yang secara cerdik digunakan oleh rezim Sukarno sebagai instrumen diplomasi yang ampuh. Pada saat yang sama, event ini juga menjadi pemicu utama pergeseran drastis dalam politik luar negeri Indonesia selama Era Demokrasi Terpimpin. Penyelenggaraan acara ini secara fungsional merupakan proyek *nation branding* Sukarno untuk mencapai tujuan diplomatik dan membentuk citra internasional Indonesia yang kuat. Sukarno secara pribadi mengendalikan seluruh persiapan, dan hasilnya terwujud dalam pembangunan Politik Mercusuar, khususnya kompleks Gelora Bung Karno (GBK) yang menjadi kebanggaan nasional.

Pembangunan infrastruktur raksasa ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas olahraga, tetapi juga menjadi simbol nasionalisme dan modernitas, bertujuan untuk membangun citra Indonesia yang kuat sebagai pemimpin negara-negara Asia-Afrika di kancah global. Akan tetapi, event ini segera memicu kontroversi diplomatik signifikan ketika panitia penyelenggara, atas dorongan agenda politik luar negeri Sukarno, menolak mengeluarkan visa untuk delegasi dari Israel dan Taiwan (ROC).

Kontroversi penolakan Israel dan Taiwan (ROC) ini tidak hanya berujung pada sanksi dari IOC, yang menilai Indonesia telah mencampuri urusan politik dalam olahraga internasional, tetapi juga menjadi katalis utama yang berkontribusi pada lahirnya GANEFO (Games of the New Emerging Forces) dan perubahan fundamental dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap negara-negara Barat. Sebagai respons langsung dan konfrontatif terhadap dominasi Barat yang dirasakan, Sukarno menggagas GANEFO pada tahun 1963. Ia memposisikan GANEFO sebagai arena alternatif bagi negara-negara Dunia Ketiga untuk menantang tatanan internasional yang ada. Rangkaian peristiwa dari Asian Games 1962 yang diikuti oleh pendirian GANEFO ini secara tegas menandai bukti empiris adanya pergeseran politik luar negeri Indonesia. Hal ini terlihat dari perubahan pendekatan diplomasi yang awalnya kooperatif menjadi konfrontasi terbuka dalam periode 1962–1965, sebuah sikap yang selaras dengan upaya Sukarno untuk menantang tatanan dunia antikolonial melalui olahraga internasional sebagai instrumen diplomasi alternatif.

3.2 Pembahasan

Upaya Indonesia untuk memanfaatkan Asian Games (AG) 1962 sebagai instrumen soft power secara paradoks justru bergeber menjadi kebijakan yang konfrontatif. Pergeseran ini bersumber dari kontradiksi fundamental antara implementasi diplomasi yang pragmatis dan prinsip-prinsip ideologis yang dipaksakan oleh rezim pada masa itu. Analisis Ma'mun (2019) menguatkan pandangan ini, menegaskan bahwa AG 1962 menjadi momen krusial di mana Presiden Sukarno secara strategis menggunakan olahraga sebagai alat untuk membangkitkan nasionalisme massa dan mengukuhkan legitimasi kekuasaan politiknya.

Namun, strategi politik yang agresif dalam konteks mega-event olahraga memiliki potensi besar untuk memicu ketegangan internasional, sebagaimana disorot oleh Creak (2024). Hal ini menjelaskan mengapa penolakan terhadap partisipasi Israel dan Taiwan dalam AG 1962 justru mengakibatkan isolasi diplomatik bagi Indonesia dari tatanan olahraga global yang didominasi oleh negara-negara Barat. Dilema ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Weinstein (1972) mengenai elite politik Indonesia, yaitu pilihan sulit

antara menerima dukungan asing yang mungkin datang dengan syarat, atau memprioritaskan ambisi kemandirian dan kepemimpinan di antara negara-negara Dunia Ketiga.

Di bawah sistem Demokrasi Terpimpin, Sukarno secara tegas memilih jalur kepemimpinan ideologis, meskipun keputusan ini berimplikasi pada konsekuensi keterasingan internasional. Lahirnya GANEFO (Games of the New Emerging Forces) pada tahun 1963 merupakan manifestasi teoretis dari strategi worldmaking Sukarno. Konsep worldmaking ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang tatanan dunia yang ada, menantang hegemoni Barat, dan membangun sebuah tatanan alternatif yang lebih adil dan antikolonial.

Quah (2025) secara eksplisit menganalisis keterkaitan antara AG 1962 dan GANEFO sebagai bagian integral dari visi worldmaking Sukarno. Ini bukan sekadar respons spontan, melainkan sebuah upaya sistematis dan terencana untuk membentuk sebuah tatanan dunia baru yang secara fundamental menentang dominasi kekuatan-kekuatan kolonial dan imperialis. GANEFO menjadi platform konkret untuk mewujudkan ambisi ini, mengumpulkan negara-negara yang memiliki aspirasi serupa untuk membangun solidaritas kolektif.

Temuan bahwa GANEFO merupakan konsekuensi politik langsung dari sanksi yang dijatuhkan oleh IOC (Komite Olimpiade Internasional) diperkuat oleh Webster (2016). Ia secara tegas menyatakan bahwa Sukarno memanfaatkan GANEFO sebagai alat strategis untuk menantang dominasi Barat dalam kancah olahraga internasional dan pada saat yang sama, mengkonsolidasikan solidaritas di antara negara-negara Dunia Ketiga. Langkah ini menunjukkan bagaimana Sukarno mengubah tantangan menjadi peluang untuk memperkuat posisi ideologisnya.

Peristiwa AG 1962 menandai titik transisi penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dari semula cenderung pada diplomasi olahraga yang kooperatif, bergeser menjadi integrasi diplomasi olahraga dengan kebijakan luar negeri yang lebih militan dan konfrontatif. Analisis Indrayani, Umar, dan Mellaz (2015) menguatkan temuan ini, menunjukkan bahwa krisis AG 1962 adalah bukti empiris dari pergeseran orientasi kebijakan luar negeri Indonesia pada era Sukarno, menuju pendekatan yang lebih berani dalam menghadapi tatanan global.

Keterasingan diplomatik yang berujung pada pembentukan GANEFO, dan bahkan lebih jauh lagi, pada keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1965, merupakan harga yang harus dibayar untuk ambisi kepemimpinan worldmaking Sukarno. Ini adalah cerminan dari kesediaan rezim untuk menanggung konsekuensi demi prinsip-prinsip ideologis. Suryadinata (1998) juga mencatat pendekatan ini sebagai penggunaan konfrontasi sebagai strategi untuk secara langsung menantang tatanan internasional yang sudah mapan.

Dampak dari keputusan-keputusan ini tidak hanya terbatas pada arena olahraga atau politik luar negeri, tetapi juga meresap ke dalam identitas nasional Indonesia. Melalui retorika anti-kolonial dan anti-imperialisme yang kuat, Sukarno berhasil memobilisasi dukungan domestik yang masif. Olahraga, dalam konteks ini, tidak hanya sekadar kompetisi fisik, melainkan menjadi arena perjuangan ideologis yang lebih besar, memperkuat narasi kemandirian dan keberanian Indonesia di mata dunia.

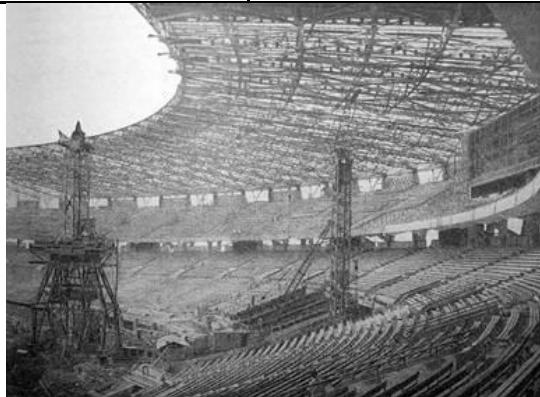
Meskipun strategi konfrontatif ini menimbulkan isolasi diplomatik dalam jangka pendek, dalam perspektif historis, ia juga membentuk fondasi bagi identitas politik luar negeri Indonesia yang non-blok dan berani. GANEFO, meskipun berumur pendek, menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat dan aspirasi kolektif negara-negara berkembang untuk memiliki suara yang setara di panggung global. Ini mencerminkan

upaya Indonesia untuk memproyeksikan kekuatan tidak hanya melalui kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga melalui kepemimpinan ideologis.

Pada akhirnya, pengalaman AG 1962 dan pembentukan GANEFO menjadi studi kasus yang menarik tentang bagaimana sebuah negara memanfaatkan olahraga sebagai alat politik. Ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara diplomasi, ideologi, dan ambisi nasional dalam konteks hubungan internasional. Warisan dari periode ini masih terasa hingga kini, membentuk pemahaman kita tentang peran Indonesia dalam mencari posisi dan pengaruhnya di antara bangsa-bangsa, dengan menekankan pentingnya kemandirian dan penentuan nasib sendiri.

Tabel 1. Kronologi Krisis Olahraga dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Era Demokrasi Terpimpin

Tanggal / Periode	Peristiwa Kunci	Konsekuensi Kebijakan Luar Negeri	Hubungan Ideologis
Agustus 1962	Asian Games IV Jakarta: Penolakan delegasi Israel dan Taiwan (ROC)	Aksi politik yang melanggar janji internasional.	Integrasi prinsip politik anti-kolonial ke dalam olahraga.
September 1962	Sanksi Resmi IOC: Indonesia diskors dari Olimpiade Tokyo 1964	Pemicu langsung bagi pencarian tatanan alternatif.	Penolakan terhadap institusi Barat sebagai hegemoni.
November 1963 1964–1965	Penyelenggaraan GANEFO I di Jakarta	Pembentukan aliansi olahraga/politik baru (NEFO).	Manifestasi konsep Worldmaking Sukarno.
	Eskalasi Konfrontasi, Upaya CONEFO, Keluarnya Indonesia dari PBB	Puncak isolasi diplomatik; Aliansi yang diperkuat dengan Blok Timur/RRC.	Konsekuensi logis dari pergeseran orientasi konfrontatif yang dimulai pada 1962.



Gambar 1. Gelora Bung Karno (GBK) saat Konstruksi (April 1962)



Gambar 2. Monumen Selamat Datang (Tugu HI), Selesai 1962



Gambar 3. Momen Upacara Pembukaan/Parade Atlet (28 Agustus 1962)
Tepat pada waktunya untuk Olimpiade di bulan Agustus, berkat pinjaman dari Uni Soviet.



Gambar 4. Stadion Gelora Bung Karno Selesai Pada Juli 1962



Gambar 5. Presiden Soekarno Menyambut Para Pesaing



Gambar 6. Dan Tuan Rumah, Indonesia Yang memiliki jumlah atlet terbesar di Olimpiade.

4. KESIMPULAN

Asian Games IV 1962 menandai momen krusial dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam membentuk arah kebijakan luar negeri pada era Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Penyelenggaraan acara olahraga akbar ini jauh melampaui sekadar prestasi nasional; ia menjadi titik balik yang secara konkret menunjukkan pergeseran orientasi politik luar negeri Indonesia dari pendekatan yang lebih akomodatif menuju konfrontasi, selaras dengan semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme yang diusung Sukarno.

Peristiwa ini, yang diwarnai oleh penolakan visa atlet dari negara-negara tertentu yang berafiliasi dengan Israel dan Taiwan (yang diakui oleh Indonesia sebagai wilayah Tiongkok), memicu kemarahan Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan federasi olahraga internasional lainnya yang didominasi oleh Blok Barat. Akibatnya, Indonesia menghadapi ancaman sanksi dan potensi isolasi dari arena olahraga internasional. Namun, alih-alih mundur, Sukarno justru memanfaatkan momen ini untuk menegaskan kedaulatan dan prinsip politiknya. Ia dengan berani mendeklarasikan pembentukan Games of the New Emerging Forces (GANEF) pada tahun 1963. GANEFO bukan hanya sekadar acara olahraga tandingan, melainkan simbol diplomasi olahraga tandingan Sukarno yang bertujuan untuk menyatukan negara-negara "kekuatan-kekuatan baru yang sedang berkembang" (new emerging forces) dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang menentang dominasi Barat.

Dengan memanfaatkan mega-event olahraga sebagai instrumen politik yang ampuh, Sukarno berhasil melakukan *nation branding* yang kuat di satu sisi. Melalui Asian Games 1962 dan GANEFO, Indonesia memproyeksikan citra sebagai pemimpin dunia ketiga yang berani dan independen, menentang hegemoni Barat, serta memperjuangkan keadilan dan kesetaraan global. Ini adalah upaya strategis untuk membangun solidaritas di antara negara-negara non-blok dan menantang tatanan dunia yang didominasi oleh dua blok besar kala itu.

Namun, keberanian ini juga memicu konsekuensi yang signifikan, yaitu isolasi diplomatik dari lembaga-lembaga internasional yang dikuasai Blok Barat, termasuk IOC. Keputusan untuk menarik diri dari IOC sebagai bentuk protes terhadap tekanan Barat semakin menegaskan bahwa diplomasi olahraga di bawah Sukarno adalah medan tempur ideologis yang signifikan pada masa Demokrasi Terpimpin. Ini bukan hanya tentang memenangkan medali, tetapi tentang memenangkan hati dan pikiran, serta membentuk narasi global yang menentang status quo. Melalui peristiwa-peristiwa ini, Sukarno berhasil menempatkan olahraga sebagai bagian integral dari strategi politik luar negeri Indonesia, menjadikannya alat untuk memperjuangkan cita-cita revolusi dan menegaskan identitas bangsa di kancah internasional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Creak, S. (2024). Sport, diplomacy, and regionalism in Southeast Asia: the Southeast Asian (SEA) Games and ASEAN. *Sport in Society*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/17430437.2024.2325971>
- Dahlan, M. M. (2016). Ganefo: Olimpiade kiri di Indonesia. *Warungarsip*.
- Hanna, W. A. (1962). The politics of sport: Indonesia as host to the "Fourth Asian Games". (*AUFS Reports, Southeast Asia series*, Vol. 10, No. 19). American Universities Field Staff.
- Indrayani, I., Umar, H., & Mellaz, A. (2015). Indonesia's Foreign Policy during the Sukarno Era 1945–1965: Orientation Shift from Diplomacy to Confrontation. Prosiding Seminar Nasional Universitas Nasional Jakarta (UNAS).
- International Journal of Cultural History. (2021). The Games of the New Emerging Forces (GANEFO) 1963 [Editorial/Focus Article]. *International Journal of Cultural History*.
- Ma'mun, A. (2019). Governmental roles in Indonesian sport policy: From past to present. *The International Journal of the History of Sport*, 36(4-5), 388–406. <https://doi.org/10.1080/09523367.2019.1618837>
- Quah, S. J. (2025). An anatomy of worldmaking: Sukarno and anticolonialism from post-Bandung Indonesia. *American Journal of Political Science*. (Forthcoming/Early View).
- Saputro, I. N. (2025). El deporte a la sombra del golpe: el impacto político de megaeventos. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, (62), 1132–1139.
- Suryadinata, L. (1998). Indonesia's foreign policy under Suharto: Aspiring to international leadership. *ISEAS-Yusof Ishak Institute*.
- Webster, D. (2016). Sports as third world nationalism: The games of the new emerging forces and Indonesia's systemic challenge under Sukarno. *Journal of American-East Asian Relations*, 23(4), 395–406. <https://doi.org/10.1163/18765610-02304007>

Weinstein, F. B. (1972). Indonesian foreign policy and the dilemma of dependence: From Sukarno to Soeharto. Cornell University Press.